

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Daerah Suku Tengger Bromo (*Sabrang Kulon*) sudah dikatakan berhasil. Hal ini dilihat dari peran para aktor pelaksana yang telah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan. Aktor pelaksana tersebut adalah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Pasuruan beserta Dukun Adat Suku Tengger Bromo, yang dalam melaksanakan kegiatan kesinergian, para aktor pelaksana ini saling merapkan kepercayaan, kejujuran, dan komunikasi yang efektif, sehingga tercipta sebuah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi strategi sinergi yang berkesinambungan sesuai dengan prinsip, pedoman, ketentuan dan ketetapan dalam melaksanakan pelestarian.

2. Keberhasilan Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat, juga dilihat dari program-program pelestarian dengan ketentuan mengenai pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan beserta Lembaga Adat salah satunya melalui program *enkulturasi*/pewarisan budaya dengan sarana pendidikan, dan program pemanfaatan kebudayaan melalui

pengembangan wisata. Serta kewajiban dalam memperhatikan keharusan-keharusan dalam melaksanakan program pelestarian telah sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan, Sehingga tercipta sebuah tata kelola pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo, yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.

3. Keberhasilan Sinergi juga dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana yakni anggaran/pendanaan dan mobil wisata untuk mendukung pelaksanaan sinergi dalam menyelenggarakan program-program pelestarian di Kebudayaan Suku Tengger Bromo yang telah ada dan terwujud di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan beserta Dukun Adat Suku Tengger Bromo, *sabrang kulon*. Pendanaan dan mobil wisata ini telah dimanfaatkan secara efektif, efisien sesuai dengan isi pembahasan yang terdapat didalam peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan pelestarian kebudayaan, dan tidak bertentangan dengan prinsip sinergi ideal.

4. Keberhasilan Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Daerah Suku Tengger Bromo, *sabrang kulon* yang mengacu pada dasar-dasar ketentuan dan ketetapan didalam peraturan-peraturan dalam menerapkan program pelestarian seperti program *enkulturasi*/pewarisan budaya melalui sarana pendidikan, adalah terjaganya keaslian nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat suku tengger bromo sebagai suatu jenis perubahan kemajuan (*progress*), tanpa menghilangkan, mengurangi bahkan melebihi dan merusak

unsur-unsur asli dari budaya suku tengger, agar terhindar dari perubahan sosial masyarakat sebagai suatu bentuk kemunduran (*regress*).

5. Hasil Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat yang paling memuaskan adalah keberhasilan dalam mewujudkan potensi wisata kebudayaan, melalui program pemanfaatan pengembangan wisata, yang diwujudkan sebagai produk kemasana daya tarik istimewa yang menjadi ciri khas dan digagas oleh Kab. Pasuruan, dan disukai oleh para pelaku destinasi, dengan menempatkan kekuatan dan potensi masyarakat local sebagai sendi pengembangan pariwisata (*community based*), yakni Wisata Kebudayaan Suku Tengger Bromo, yang tidak terbatas akan kegiatan Upacara-upacara saja, akan tetapi keseluruhan dari Kebudayaan Suku Tengger Bromo, *sabrang kulon*.

6. Faktor pendukung dalam Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo, adalah Rincinya isi ketentuan dan ketetapan dalam pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008, membuat segala ketentuan dan ketetapan peraturan ini mudah dimengerti dan dipahami oleh aktor-aktor pelaksana sinergi.

7. Faktor pendukung Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan Di Daerah Suku Tengger Bromo

juga dilihat dari sikap dari aktor-aktor pelaksana yang bersedia menerima segala ketentuan dan tanggung jawab, serta kesadaran dalam menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dan pedoman-pedoman sinergi ideal yang terpusat, terpadu dan berkesinambungan dalam pelaksanaan program-program sinergi dengan diperkuat ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan.

8. Faktor penghambat Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan di Suku Tengger Bromo

*sabrang kulon* adalah Kapasitas SDM yang masih rendah akibat pemikiran / *mindset* yang masih sangat tradisional, sehingga dalam penyelenggaraan program-program pelestarian kebudayaan masih mengalami kendala. Namun hal ini merupakan hal yang wajar, karena dalam perkembangan waktu, masyarakat suku tengger akan dan mau melakukan perubahan-perubahan ketahap yang lebih maju (*progress*) untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan masyarakat suku tengger bromo *Sabrang Kulon*.

9. Faktor penghambat Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat yang

juga datang dari Permasalahan penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak relevan, serta tidak adanya Perda khusus yang mengatur pelaksanaan pelestarian kebudayaan suku tengger bromo. Gunung bromo dikelola oleh 4 daerah yang masing-masing memiliki cara

tersendiri dalam melakukan pelestarian kebudayaan sehingga terjadi tumpang tindih antara wilayah administrasi dan wilayah otonomi daerah masing-masing, dan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran antar wilayah. Ditambah dengan permasalahan area konservasi Gunung Bromo Tengger sebagai Taman Nasional yang dikelola oleh SKPD perhutani atau Perum Perhutani. Sehingga SKPD kebudayaan harus meminta ijin untuk melaksanakan pelestarian, meskipun didalam wilayah administrasi dan otonomi daerah masing-masing. Serta tidak adanya Perda khusus yang mengatur pelaksanaan pelestarian kebudayaan suku tengger bromo yang mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Pasuruan beserta Lembaga Adat/Dukun Adat.

10. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat, dalam menciptakan keberhasilan pelestarian kebudayaan suku tengger, tidak hanya didukung oleh ketentuan isi peraturan sinergi serta sikap para aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip, pedoman, dan program sinergi yang ideal, akan tetapi juga didukung oleh kesanggupan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas yang mencukupi dalam pelaksanaan sinergi, serta adanya dukungan dari masyarakat yang menjadi sendi pelestarian yang senang tiasa membantu dan menerima perubahan-perubahan, untuk kemajuan kehidupan masyarakat dengan tetap menjaga keaslian budaya sebagai hasil positif pelaksanaan sinergi.

11. Masih terdapat hambatan yang nyata, yakni masih tidak relevannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan wilayah administrasi, sehingga terdapat banyak perbedaan dan persaingan dalam pelestarian kebudayaan, contohnya dalam pelestarian kebudayaan bromo yang mengakibatkan tumpang tindih tugas yang satu dengan yang lain antar SKPD yang berkaitan. Dan tidak ada Perda yang menjamin keberlangsungan pelestarian kebudayaan suku tengger bromo, untuk menghindari pembukaan peluang peningkatan kreativitas masyarakat pengusaha dengan mengabaikan faktor kelestarian alam dan budaya, terlebih lagi didorong oleh semakin besarnya minat kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo.

## **B. Saran**

1 Dengan keberhasilan Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah Suku Tengger Bromo, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pasuruan beserta Dukun suku tengger di desa Tosari, Kec. Tosari, Kab. Pasuruan sebagai salah satu strategi pengelolaan kebudayaan, maka sinergi ini dapat dijadikan contoh untuk pelaksanaan dalam menanggulangi masalah pelestarian kebudayaan yang umumnya terjadi permasalahan dan persaingan pengelolaan di tiap daerah di Indonesia. Misalnya saja digunakan untuk strategi penyelesaian persaingan dalam pelestarian antara SKPD terkait dengan Organisasi masyarakat di daerah kebudayaan lain.

2 Agar tidak terjadi kasus tumpang tindih tugas antara SKPD yang terkait mengenai area konservasi, wilayah administrasi dan otonomi daerah masing-masing dalam pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah suku tengger bromo, diperlukan sebuah peraturan baru terkait hal tersebut, yakni Perda yang mengatur kekhususan pelaksanaan pelestarian kebudayaan suku tengger bromo dan perlu koordinasi ulang dengan masing-masing SKPD untuk menyamakan strategi dalam pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masing-masing daerah.

3 Melihat adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sinergi, maka peneliti memberikan saran:

a. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Diperlukan keberanian dan tanggung jawab dari pimpinan pemerintahan daerah kabupaten pasuruan dalam mempertahankan dan menegakkan otoritas dan wewenang dalam wilayah administrasi dan otonomi daerahnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyerobotan tanpa ijin dalam wilayah merah masing-masing daerah yang mengelola Gunung Bromo Tengger. Serta kesedian dalam memberikan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan sinergi yang menyangkut pelestarian kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan Anggaran/Pendanaan dan mengusulkan Adanya Perda Khusus Dalam Pelestarian Kebudayaan tengger bromo, sebagai ciri khas Kab. Pasuruan.

b. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan

Diperlukan keberanian dan tanggungjawab dari pimpinan baik dari

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Staf untuk

mempertahankan sistem kerja yang telah diatur dalam Peraturan-

peraturan terkait, sehingga dalam pelaksanaan sinergi berani

mengambil hak untuk mengimplementasikan program-program

pelestarian kebudayaan dan tentu saja untuk menjaga nama baik

SKPD kebudayaan, sehingga dapat terwujud sebuah hasil produk

wisata yang dikemas sesuai dengan ciri khas Kab.Pasuruan

c. Untuk Lembaga Adat Suku Tengger Bromo dan masyarakatnya di

Desa Tosari, *Sabrang Kulon*

Diperlukan keberanian untuk menerima perubahan-perubahan dalam

tahap kemajuan pola pikir / *mindset* modern, sehingga dapat

mensukseskan keberhasilan dalam bersinergi, dan keberanian untuk

tetap melestarikan dan menjaga nilai budaya asli suku tengger bromo

atau *enkulturasi*, sehingga terhindar dari pergeseran budaya /

*westernisasi* budaya akibat globalisasi.